
MADRASAH DAN KONFLIK KEAGAMAAN:

**Studi atas Konflik *Kaum Tuo- Kaum Mudo* dalam Krisis Madrasah Islamiyah
Tanjung Raja Ogan Ilir Sumatera Selatan, 1925-1932**

Novi Yanti Diana Sari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2020
Disetujui Juli 2020
Dipublikasikan Juli 2020

Keywords:
Kaum Tuo- Kaum Mudo,
Konflik Keagamaan, Krisis
Madrasah

Abstrak

Masalah utama penelitian adalah bagaimana implikasi gerakan pembaharuan yang memicu konflik di dalam Madrasah Islamiyah Tanjung Raja. Konflik sosial keagamaan yang terjadi di Tanjung Raja Ogan Ilir dalam hal ini lebih condong kepada perbedaan cara pandangan organisasi Jami'atul Khair dengan organisasi Muhammadiyah yang dalam hal ini Madrasah Islamiyah hanya dijadikan sebagai wadah penyebaran ideologi. Adapun akhir dari perseteruan konflik tersebut diakhiri dengan adanya persatuan dengan dibentuknya Ittihadoel Oelama cabang Ogan Ilir. Meskipun telah dibentuknya Ittihadoel Oelama tetap saja terjadi gesekan-gesekan kecil dan akhirnya sekolah-sekolah Muhammadiyah di Pegagan Ilir tetap berdiri sampai dengan sekarang.

Abstract

The Problem of the study was how did updateting movement implicate that trigger the conflict in Madrasah Islamiyah Tanjung Raja. Social conflict of religion that was happened in Tanjung Raja Ogan Ilir tend to differences of the view way Jami'atul Khair organization where Madrasah Islamiyah only as ideology separation place. Then the end of conflict was ended by unity formed for Ittihadoel Oelama but still there were frictions and finally Muhammadiyah schools in Pegagan Ilir still exist until now.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: novivantidianasari@gmail.com

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Polarisasi dan konflik antara kedua kelompok ini di Karesidenan Palembang terjadi hampir di semua wilayah, baik di Kota Palembang maupun pedesaan *Iliran* dan *Uluan*. Digambarkan bahwa konflik keagamaan ini tidak hanya menceraikan-beraikan keutuhan masyarakat muslim pada umumnya, tetapi juga memecah-belah keutuhan sebuah keluarga. Kondisi ini diberitakan oleh *Pertja Selatan* sebagai berikut:

“Betapa hebatnje perpetjahan dan perpisahan oemmat Islam tatkala itoe, sebagai tjontoh dapat diseboet, bahwa orang tidak segan boeat saling boycott sekalipoen dalam satoe roemah tangga, sekalipoen antara familie, bahkan antara anak dan ajah, antara saudara dengan saudara.”(*Pertja Selatan*, No 29, 9 Maret 1939, hlm. 2)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peristiwa yang dapat menggambarkan sengitnya konflik antara kaum tradisional dan modernis¹ ini dalam dunia pendidikan Islam. Di antara beberapa peristiwa yang dapat disebut dalam rentang waktu antara 1926 sampai 1932 adalah fenomena konflik yang salah satunya terjadi di Tanjung Raja.

Konflik antara *Kaum Tuo* dengan *Kaum Mudo* di Tanjung Raja terjadi dalam krisis di Madrasah Islamiyah Tanjung Raja. Konflik ini berawal dari kecurigaan sebagian pemuka dan anggota masyarakat terhadap paham keagamaan beberapa tenaga pengajar di madrasah ini.

Sebagaimana telah dijelaskan sejak awal berdirinya pada tahun 1926, Madrasah Islamiyah Tanjung Raja dipimpin oleh Sayyid bin Agil yang berasal dari organisasi dan perguruan Jami'at Khair di Betawi. Meskipun pada tahun-tahun pertama mendapat respon positif dari masyarakat, memasuki 1928 madrasah ini mulai mengalami kemunduran yang ditandai dengan semakin sedikitnya siswa- siswa yang aktif dan berhenti sekolah, dan ditandai dengan pengunduran Sayyid Agil dikarenakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap dirinya karena dianggap dirinya cenderung kepada paham agama yang dianut *Kaum Mudo* (*Pertja Selatan*, No. 39, 3 April 1930, hlm. 5-6).

Dari pernyataan tersebut jelas melihatkan penyejajaran organisasi Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Jami'at Khair semacam Sayyid Agil tampaknya agak sulit diterima di kalangan masyarakat Desa Tanjung Raja yang mayoritasnya menganut paham Islam Tradisional (*Kaum Tuo*). Dugaan ini kelak akan semakin tampak dalam kasus yang dihadapi oleh guru Sayyid bin Agil bernama Moehammad Zen yang *notabenenya* merupakan alumni Jami'at Khair (*Pertja Selatan*, No. 39, 3 April 1930, hlm. 5-6). Fenomena tradisionalisme masyarakat yang dalam pemahaman agamanya lebih melihat pada simbol lahiriah dari pada kualitas seseorang dan akan menjadi unik konteks kekinian.

Pandangan “miring” terhadap *Kaum Mudo* selalu memberikan citra negatif. *Kaum Mudo* dicap sebagai kaum Wahabi yang

¹Merujuk pada disertasi Nor Huda yang menegaskan bahwa modernisme Islam berbeda dengan reformisme Islam. Reformisme Islam merupakan proyek historis abad ke-17 dalam usaha untuk menata kembali umat Islam dan memperbaharui perilaku individu. Proyek historis ini didasarkan pada gagasan pemurnian kepercayaan dan praktik Islam dengan kembali kepada sumber autentik, yaitu Alqur'an dan Sunnah, serta memiliki kecenderungan yang kuat untuk menolak kebudayaan Barat. Modernisme Islam merupakan proyek dari generasi Islam baru yang terpengaruh Barat untuk menyesuaikan diri dengan peradaban modern, tetapi dengan tetap mempertahankan terhadap kebudayaan Islam. Dengan kata lain, modernisme Islam merupakan

sebuah titik tengah antara “Islamisme” dan “seku-larisme.” Reformisme-modernisme merupakan bentuk sintesis antara reformisme Islam dan modernisme Islam sebagaimana terjadi di Mesir. Mereka yang menolak gagasan modernisme Islam disebut sebagai reformisme tradisionalisme. (Nor Huda, 2012: 46) Berdasarkan pernyataan tersebut maka Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai gerakan reformisme-modernisme, sedangkan NU sebagai gerakan reformisme-tradisional. Namun, untuk memudahkan penyebutan, di dalam tulisan ini hanya disebut dengan tradisionalisme Islam atau modernisme Islam tanpa menyertakan reformisme.

selanjutnya akan berujung pada perpecahan pada umumnya bersifat agama, tetapi perpecahan selanjutnya dapat dikatakan meluas ke bidang lain, karena perpecahan tersebut mengandung sifat-sifat politis (Peeters, 1997: 157. Seperti tampak pada para anggota Sarekat Islam sebagai organisasi terbesar di masanya, banyak anggota meninggalkan paham ini dan mempergunakan paham komunis dengan tujuan untuk menentang Belanda. Beberapa pemimpin mulanya mempunyai hubungan langsung dengan Comintern² terutama untuk *Kaum Mudo*.

Dengan memahami latar belakang masalah dan fakta-fakta historis yang diperoleh dari kajian awal yang telah dilakukan terhadap beberapa data sebagaimana disebutkan di atas patut diduga bahwa dalam satu setengah dasawarsa menjelang berakhirnya kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, pernah terjadi suatu perkembangan yang cukup dinamis dalam dunia pendidikan Islam di Sumatera Selatan. Penelitian ini lebih jauh berusaha mencari penjelasan tentang sejarah dan studi atas konflik *Kaum Tuo-Kaum Mudo* dalam krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja, Ogan Ilir Tahun 1925. Dipilihnya tahun 1925 sebagai titik tolak, karena pada tahun inilah lembaga pendidikan Islam yang bersifat modern dalam arti yang sebenarnya (sistem dan kelembagaan) pertama kali muncul di wilayah pedesaan yaitu munculnya Madrasah Islamiyah Tanjung Raja, Ogan Ilir.

Sebagaimana dipahami bahwa perkembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di manapun tidak berada dalam ruang hampa, tetapi sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi keagamaan, sosial, ekonomi, politik yang terjadi pada masa itu. Karena itu, kajian ini juga mencari penjelasan tentang sejauh mana faktor-faktor tersebut ikut

memainkan peran dalam menghambat maupun memacu perkembangan dan resistensi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam.

Alasan akademis perlunya penelitian ini dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kuatnya sikap antipati *Kaum Tuo* terhadap *Kaum Mudo*, baik secara struktural maupun kultural dalam historiografi lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan. Penulisan tentang pembaharuan Islam (*Kaum Mudo*) dalam lembaga pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya di Tanjung Raja sering mengandung bias, yakni munculnya konflik yang berujung perpecahan umat. Padahal pemikiran *Kaum Mudo* menyokong kemajuan umumnya tanpa mengikat diri pada tradisi yang ada, *Kaum Mudo* berusaha menghapuskan *bid'ah* dan *khurafat* yang dipandang sebagai faham dan perbuatan yang berlawanan dengan syari'at.

Survei terhadap data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa dalam waktu lebih dari satu setengah dasawarsa kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia telah terjadi berbagai perubahan sosial dan keagamaan yang signifikan pada masyarakat Sumatera Selatan. Perubahan-perubahan ini tampaknya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem dan lembaga pendidikan Islam yang muncul selama kurun waktu itu dan munculnya upaya integrasi umat Islam dan tokoh-tokohnya yang terlibat konflik *Kaum Tuo-Kaum Mudo* dalam wadah *Ittihadoel Oelama (Pertja Selatan*, No. 29, 9 Maret 1939, hlm. 2) Fenomena kebangkitan organisasi Islam dari yang berskala lokal sampai nasional di Sumatera Selatan, misalnya tampak dari peran para aktivis yang berasal dari lembaga pendidikan Islam, hal ini menjadi alasan kuat untuk menulis terkait tentang Madrasah Islamiyah di Tanjung Raja, Ogan Ilir..

²Sebagaimana penjelasan Nor Huda bahwa Lenin berusaha menerapkan ajaran-ajaran revolusioner Marx dalam konteks masyarakat semi agraris dan semi feodalistik Uni Soviet sehingga kelas proletar memiliki kesadaran revolusioner yang akhirnya Lenin memperkenalkan konsep *vanguard* (Polibitro) dalam terminologi Komunis. Terminologi ini merujuk pada sekelompok kecil kaum elite proletar yang terdidik,

revolusioner, mempunyai kesadaran kelas yang tinggi dan setia pada cita-cita komunis, maka dari doktrin inilah dikenal istilah Komunis Internasional (Nor Huda, 2012:218).

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode tersebut ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan. Pertama, heuristic atau pengumpulan data. Tulisan ini menggunakan beberapa data primer seperti arsip dan surat kabar yang didapatkan di beberapa tempat seperti Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional. Disamping itu penelitian ini juga ditunjang dengan berbagai sumber-sumber sekunder yang relevan. Kedua, tahapan kritik sumber yaitu proses pengujian data yang telah didapatkan baik secara eksternal maupun secara internal. Ketiga, tahapan interpretasi data yaitu melakukan penafsiran data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Terakhir adalah tahapan historiografi, dimana hasil interpretasi ditulis menjadi karya yang tercantum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Gerakan Pembaharuan Islam di Karesidenan Palembang

Selain ide pembaharuan dari Mesir,³ ternyata di Indonesia jauh sebelum ide pembaharuan tersebut telah terlebih dahulu masuk gerakan pemurnian Wahabiah Minangkabau (Noer, 1996:37-38). Disinyalir masuknya pengaruh ide pembaharuan khususnya di Karesidenan Palembang dari Minangkabau ini, pada kenyataannya berbanding terbalik dengan daerah lain yaitu ide pembaharuan Islam lebih berkembang di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan hal ini di karenakan letak geografis dan sosioal-ekonomi dari daerah

tersebut. Menurut Peeters Reformasi di Sumatera tampaknya berkembang baik di dataran tinggi yang sejuk dan di tanah berbukit di kedua sisi Bukit Barisan, seolah-olah memakai gunung-gunung Bukit Barisan sebagai dinding benteng pertahanan terhadap dataran rendah di pesisir (timur) yang lebih banyak mengadakan perlawanan terhadap timbulnya reformasi (Peeters, 1997: xviii).

Menurut Loeb, jalinan sungai di Sumatera sangat luas dan bernilai besar bagi negeri tersebut. Karena kedekatan pegunungan dengan pesisir barat sungai-sungai itu mengalir di lembah yang curam dengan arus yang sangat rendah, maka umumnya tidak dapat dilayari kecuali di dekat mulut sungai (Loeb, 2013:2). Namun demikian, sungai-sungai di sebelah timur mengalir melewati dataran-dataran aluvial, memiliki wilayah aliran sungai yang luas, dan menciptakan sarana komunikasi yang paling utama. Walaupun tidak ditegaskan secara tidak langsung sesungguhnya peran sungai dalam penyebaran Islam, tetapi secara geografis kota-kota kerajaan tersebut merupakan kota-kota muara sungai dan tidak bisa pula diingkari bahwa kota-kota kerajaan itu berlokasi di ujung jalan setapak yang berawal di daerah pedalaman (Asnan, 2016:96). Beberapa sejarawan menegaskan dimanfaatkannya sungai sebagai faktor penting dalam pertumbuhan Islam. Hamka misalnya mengatakan bahwa Islam sesungguhnya telah masuk ke daerah pedalaman bagian tengah Sumatera (kawasan Kampar) sejak abad millenium pertama (Asnan, 2016: 97). Hamka menyebutkan adanya kerajaan sungai kawasan itu, dan dilaluinya sungai oleh para penyebar (mubalig) Islam untuk mencapai kawasan tersebut. William Marsden memperkirakan bahwa masuknya Islam ke

³Muncul ide pembaharuan di Mesir tidak dapat dilepaskan dari tiga latar belakang diantaranya kesadaran pembaharuan secara intern sebagai akibat dampak pemikiran Ibnu Taimiyah, lahirnya peradaban baru dari Barat yang disebut masa *Renaissance* yang memunculkan ide sentral modernisasi serta pemikiran rasional-ilmiah sehingga melahirkan sains dan teknologi yang dimulai sekitar

abad ke-16, serta kondisi negara-negara Arab yang memperhatikan di bawah imperialisme negara-negara Eropa khususnya Perancis. (Kalsum, 2014: 34).

kawasan tengah Sumatera dibawa dari Malaka. Perkiraan ini didasarkan oleh kedekatan daerah Minangkabau (pedalaman) dengan kota Bandar tersebut.⁴ Dari uraian tersebut, ada kemungkinan hal serupa juga terjadi di Karesidenan Palembang.

Kekayaan besar yang dimiliki masyarakat pedesaan itu sangat memberi pengaruh terhadap pemahaman beragama (Islam) di tingkat pedesaan. Dengan kekayaan ini pula mendorong orang kaya pedesaan untuk pergi haji. Meskipun minat haji meningkat, pada awalnya pengaruh para haji terhadap penduduk Palembang sedikit. Jamaah yang pergi pada tahap awal ke Hijaz biasanya langsung kembali sesudah beribadah haji. Namun, keadaan itu berubah setelah tahun 1870an, jumlah orang Palembang yang menetap di Mekkah untuk menimba ilmu meningkat cepat. Pada masa itu rata-rata setiap tahun 1.400 jamaah bertolak dari Residen Palembang. Bahkan pada tahun 1927 dicapai 7.000 jamaah haji. Ini dapat terjadi karena bagi mereka ongkos naik haji sebesar f250 yang ditetapkan pemerintah terlalu kecil dibanding harga karet, kopi, dan sebagainya yang melambung tinggi (ANRI, 2002:2).

Bersamaan meningkatnya jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji ke Tanah

Suci,⁵ sejak awal abad ke-20 sampai akhir 1940-an di kalangan masyarakat Sumatera Selatan terdapat tradisi menuntut ilmu di Timur Tengah, terutama Haramyn (Mekkah dan Madinah), dan Mesir. Seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat, antara lain akibat *booming* harga karet (Purwanto, 1992). Karet menjadikan Palembang sebagai pasar yang menjadi media dalam alur perdagangan dari daerah pedalaman menuju dunia perdagangan Internasional. Geliat kota dagang terjadi ketika munculnya *booming* karet di daerah *Uluan*, pedusunan atau pedalaman Palembang terutama di daerah *Iliran*, Kota Palembang. Sejak dasawarsa kedua abad ke-20 alat-alat transportasi darat (oto dan kereta api) mulai lazim digunakan oleh sebagian penduduk daerah pedalaman sehingga secara praktis dominasi infrastruktur lalu lintas darat berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan produksi karet (*Hampo*, 29 November 1926, hlm.2).

Komoditas pertanian terutama karet mengakibatkan terbukanya hubungan dengan dunia luar. Salah satu yang penting adalah meningkatnya jumlah orang yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Kawasan Komerling khususnya merupakan tempat pesebaran pertama tanaman dagang karet di daerah Palembang,

⁴Di samping berbagai “teori” yang dikemukakan penulis-penulis di atas, peranan sungai dalam penyebaran Islam di Minangkabau juga terlihat dari “pengakuan” orang Minangkabau terhadap peranan sungai atau daerah Siak sebagai pusat penyebaran Islam ke daerah itu. “Pengakuan” tersebut terlihat dari penamaan yang diberikan oleh orang Minangkabau terhadap ulama atau mubaligh, yakni “orang Siak”. Siak adalah nama sungai dan nama daerah, sehingga penamaan orang Siak mengandung pengertian bahwa ulama atau mubaligh yang menyebarkan Islam di Minangkabau datang melalui sungai atau daerah Siak (sebelum mereka sampai ke Minangkabau) (Asnan, 2016 :96-97).

⁵Sampai Juni 1930 perjalanan jamaah haji Indonesia pulang pergi ke Tanah Suci menunjukkan keadaan yang cukup lancar dan aman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seorang haji dari *Uluan* Palembang yang baru

kembali dari Tanah Suci (dengan naik kapal “Soekaboemi” bersama dengan jamaah haji Indonesia lain yang berjumlah 1200 orang) menceritakan kembali kisah perjalanannya yang aman dan lancar serta keadaanya selama di Tanah Suci. Di antaranya adalah tentang beberapa peristiwa penting di Tanah Suci seperti perbedaan dalam hal-hal *furu’* antara pengikut Imam Syafi’i dan Hanafi dan kesengsaraan sebagian jama’ah dari Palembang dan Jambi di Tanah Suci karena hanya sedikit membawa bekal uang. Disebutkan pula bahwa dalam urusan mengaji (belajar Islam) tidak benar adanya larangan dari pemerintah Hijaz sebagaimana banyak dikabarkan, karena “...orang-orang jang ngaji dan jang mengadjar ada merdika menoeroet soekanja (*Pertja Selatan*, No.65 12 Juni 1930, hlm.1-2; Ismail, 2014:232).

seperti kutipan Mestika Zed berikut ini “Penduduk Kayuagung dan Tanjung Raja (Komerang), misalnya dengan telanjang mata menyaksikan semakin banyak *oto Ford* yang lalu-lalang dipergunakan pemilikinya untuk mengangkut karet”. Akibat *booming* karet tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah *Uluan* Palembang merupakan daerah yang paling banyak memberangkatkan orang ke Tanah Suci antara tahun 1914-1923 berkat keuntungan yang diperoleh dari komoditas karet.

Menariknya bahwa sebagian besar di antara mereka yang berangkat ke Mekkah tidak segera pulang ke kampung halaman. Mereka tampaknya sengaja menetap di Tanah Suci atau tempat-tempat lain di Timur Tengah. Di tempat itu mereka mempelajari dan memperdalam pengetahuan agama Islam.⁶ Dampak perkembangan ekonomi dikaitkan dengan mobilitas sosial periode berikutnya, kecenderungan orang di Karesidenan Palembang yang berangkat menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pendidikan agama di Timur Tengah merupakan hal amat penting.

Tanjung Raja (Ogan Ilir) memainkan peran penting dalam hal pembaharuan Islam. Wilayah yang dihuni oleh masyarakat Pegagan yang berdekatan langsung dengan kota. Daerah ini sejak dahulu berkembang lalu lintas perdagangan yang ramai dengan Palembang serta sejak 1821 orang Palembang juga mulai menetap di Pegagan (Peeters, 1997: 71). Awalnya, golongan priyayi yang melarikan diri dari penguasa baru di kota dan kemudian memilih menetap di Ogan Ilir. Dengan terbentuknya *Pax Nederlandica*, pedagang Palembang mulai mengunjungi desa Ogan Ilir untuk membeli hasil pertanian dari penduduk Pegagan. Kedatangan kedua kelompok perantara ini perluasan pola kebudayaan religius ibu kota di lingkungan pedesaan. Sesudah tahun 1821,

penduduk Pegagan mulai ketat mematuhi ritual agama Islam.

Di Pegagan, proses Islamisasi selanjutnya didukung kuat oleh lapisan atas masyarakat pedesaan, yang cenderung meniru pola kebudayaan bergengsi elite kota. Jenang Wira Jaya, kepala adat Pegagan Ilir yang telah naik haji ke Mekkah sebelum tahun 1840. Melalui saluran ini norma elite juga dipancarkan yang selanjutnya diwujudkan dalam praktik keagamaan penduduk pedesaan di bawah pimpinan Jenang H. Wirajaya. Dengan bersandar kepada kode yuridis Islam yang tertulis, Jenang Wirajaya berhasil menggeser hukum adat yang bersifat lisan. Terputus dari lingkaran pengetahuan yang lebih tinggi sampai 1920 pegawai agama cenderung untuk membenarkan tradisi lokal yang dipimpin oleh kepala Marga. Perubahan sosial-ekonomi yang mendalam pada tahun 1920an benar-benar menguji rezim religius di pedesaan.

Praktik Sosial Keagamaan *Kaum Tuo-Kaum Mudo* Di Tanjung Raja

Gesekan yang terjadi antara *Kaum Tuo-Kaum Mudo* di Tanjung Raja sebagai ungkapan ekspansi pasar lebih lanjut akan diperkuat lagi oleh pemisahan rohani yang akan disebabkan pembaharuan dalam masyarakat berukuran kecil ini. Di Tanjung Raja, drama sosial dimulai sejak 1925, ketika seorang bernama H. Hamdan memperlihatkan dirinya sebagai pengikut yang gigih terhadap gerakan pembaharuan Islam. Seperti di banyak tempat lainnya di daerah ini debat tentang doa talqin menggerakkan pula proses konfrontasi yang akan merobek masyarakat. Proses ini ditandai dengan ketidakpastian yang besar akibat perpecahan terang-terangan dan sengaja dengan berbagai praktik keagamaan, di antaranya:

⁶ Pada tahun 1930, dari sekitar 2.336 orang Indonesia sering disebut permukiman “Djawi” di Mekkah, 872 orang di antaranya berasal dari Palembang, kelompok terbesar sesudah orang Sunda (908 orang). Jika dilihat persentase jumlah penduduk, orang Palembang yang menetap di Mekkah jauh

lebih besar ketimbang orang Sunda. Kelompok etnis lain adalah Minangkabau, Sumatera Barat (314 orang), Jawa Timur (104), serta Bali dan Lombok (148) (Zed, 2003:113-114).

Pertama, masalah perdebatan tentang sholat Jumat di kampung Muara Penimbung marga Tanjung Sejaro, Ogan Ilir atau Pegagan Ilir suku I, *afdeeling* Tanjung Raja, Ogan Komerling Ilir dan Blida, Karesidenan Palembang. Di kampung ini telah berdiri sebuah masjid kurang lebih seratus tahun yang lalu. Masjid itu didirikan oleh nenek moyang Ijoen, sekaligus diwakafkan untuk peribadatan bagi umat Islam di kampungnya. Secara turun-temurun masjid itu dikelola oleh para ahli waris termasuk Ijoen, tanpa suatu masalah apapun. Segala kegiatan keagamaan termasuk ibadah sholat Jum'at dilaksanakan pula masjid itu. Tetapi ketenangan tersebut terusik manakala pada tahun 1887 di desa itu didirikan pula sembahyang Jum'at di suatu langgar yang fungsinya dirubah menjadi masjid. Sebetulnya tujuan semula mendirikan langgar tidaklah dipergunakan untuk sholat Jum'at hanya untuk tempat peribadatan. Langgar ini diwakafkan pada tahun 1887 oleh pemiliknya seorang janda bernama Sawiyah untuk dijadikan tempat peribadatan. Oleh Kepala Kampung Muara Penimbung pada waktu itu bernama Kerio Soendal yang didukung oleh Khotib Haji Abdul Halim, langgar tersebut dikelolanya bahkan dirubah menjadi masjid dan fungsinya diperluas dipergunakan untuk pelaksanaan sembahyang Jum'at.

Perubahan ini ternyata menjadi masalah. Banyak pihak tidak setuju, sehingga terjadi perselisihan ditengah masyarakat terutama antara kelompok pengikut kedua rumah ibadah tersebut. Menurut alasan kelompok masjid lama dibawah pimpinan Ijoen disebutkan bahwa letak masjid baru tersebut sangat dekat dengan masjid lama, kira-kira hanya 100 depa, masih dalam jarak pandang dari masjid lama. Dengan demikian suara azan pun jelas masih terdengar. Menurut hukum Islam dari mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat Islam di Palembang, tindakan ini tidak diperbolehkan. Dalam mazhab tersebut lebih jauh disebutkan bahwa disatu tempat hanya boleh terdapat satu sembahyang Jum'at. Karena itu membangun masjid lagi, baru dapat dibenarkan kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila Sholat

Jum'at tetap dilaksanakan di kedua masjid baik yang lama maupun baru, maka sholat Jum'at tersebut menjadi batal pada masing-masing masjid tersebut. Mazhab Syafi'i mengakui sah pada pelaksanaan sholat Jumat di Masjid yang terlebih dahulu didirikan.

Pertentangan ini ternyata berlarut-larut, sehingga kelompok Ijoen mengirimkan surat pengaduan kepada *Controleur* Tanjung Raja perihal peristiwa di atas. Pengaduan tersebut ditanggapi oleh kontrolir yang kemudian dibawa ke rapat besar pada tanggal 28 Juli 1887. Vonis dari rapat besar diumumkan dalam rapat marga. Bahwa *Kerio* Soendal wajib mengembalikan uang rampasan kepada pemilik, dan itu telah dilaksanakan. Semua masjid serta rumah wakaf harus dijual lelang. Uang hasil lelang untuk membuat masjid baru, jadi semua harus dirobohkan dari dua *langgar* dibongkar dijadikan satu masjid. Dan jumlah uang yang diperoleh itu sebesar 50 gulden.

Kedua, masalah yang terjadi di Ogan Ilir selanjutnya adalah praktik ritual orang mati. Seperti yang dikutip dalam *Pertja Selatan* berikut ini:

Tiba disana penoelis sangat terperandjat melihat seorang perempoean toea jang ranboetnja jang soedah poetih terorai kainja setengah hampir terlepas, matanja bengkak, berentah-rentah kehulu kehilir melolong2 menangis kesedihan beserta dengan ratapnja: Ja Allah, alangke kesiannje akoe tenga adik;paja bae ibadat selame ika, alangke da' lemaknje kene siksean dalam koeboer. Karenje "kaoem Moedo" djadi goegoer iman islamnje (masoek neraka)". Soedara perempoean toea itoe meninggal doenia dan soedah selesai dikoeboerkan. Anaknja adalah sebagai "Kaoem Moedo", djadi semoea sjarat2 dan roekoen djenazah dikerdjakan oleh anaknja. Otoelah sebabnja perempoean toea itoe menjessak, sehingga seroepa kemasoekkan iblis (Pertja Selatan, No.138, 4 Desember 1930, hlm.9).

Dari kutipan di atas, ternyata perlawanan terhadap *Kaum Mudo* juga tampak pada ajaran H. Hamdan dipimpin oleh K.H. Mulkan dari Talang Balai. Sebagai kiai senior yang sekaligus berpangkat Khotib H.Mulkan merasa tersinggung oleh serangan gigih lawannya yang

jauh lebih muda. Akibat konflik sekitar doa talkin, pada tahun 1927 K.H Mulkan berusaha mengisolir *Kaum Mudo* dengan mengumumkan boikot total terhadap H.Hamdan serta pengikutnya di Talang Balai. Sesudah pengumuman boikot total terhadap H.Hamdan serta pengikutnya di Talang Balai. Sesudah pengumuman boikot itu, masyarakat tidak boleh lagi mengunjung, meminta bantuan, berbicara apalagi menghadiri pemakaman keluarga *Kaum Mudo*. Dalam aksi boikot ini K.H. Mulkan terutama mendapatkan dukungan dari penduduk pemukiman lama yang masih tinggal di sepanjang sungai, Akibatnya, masyarakat Talang Balai semakin dibagi dalam dua kubu yang dipisahkan oleh Sungai Ogan; yaitu *Kaum Tuo* yang tinggal di tepi sungai dan *Kaum Mudo* di pemukiman baru sepanjang jalan. Perbedaan ruang ini sebenarnya juga mengungkapkan perbedaan sosial antara Talang Balai Lama dengan mayoritas petani, dan Talang Balai Baru, tempat bermukim mereka yang lebih makmur akibat perdagangan karet.

Tidak hanya keadaan sosial ekonomi menetapkan pembentukan faksi. Juga hubungan politik intern yang rumit menjadi nyata di bawah pengaruh drama sosial ini. Dalam lingkungan marga Pegagan Ilir Suku II inti *Kaum Mudo* termasuk H.Hamdan berasal dari keturunan pasirah lama. Selama abad ke-19, jabatan pasirah di Marga Pegagan Ilir Suku II dipegang oleh keturunan *Jenang* Talang Balai. Tradisi ini baru berakhir pada awal abad ke-20, ketika dalam pemilihan *pasirah*, seorang calon yang tidak termasuk keturunan *Jenang*, diangkat menjadi *pasirah*. Perolehan suara yang di peroleh *Pasirah* tersebut lebih sedikit. Dengan demikian pusat kekuasaan dalam marga Pegagan Ilir Suku II telah bergeser dari Talang Balai ke Sungai Pinang tempat tinggal *Pasirah* baru. Keadaan ini tentu sulit diterima keturunan *Jenang* Talang Balai. Dalam usaha mereka untuk meraih posisi muka, agam mulai memainkan peranan yang penting. Siasat ini jelas terlihat dalam riwayat H.Hamdan. Sesudah mengikut sekolah Al-Irsyad di Batavia pada pertengahan tahun 1920an Hamdan menunaikan ibadah hajinya dan kemudian pulang ke Talang Balai (Zed, 2003: 112; *Hanpo*,

29 November 1926, hlm.2). Kembali di kampungnya, kiai muda itu mulai meelansir program pembaharuan agamanya. Serangan H. Hamdan atas praktik keagamaan lama tentu merupakan dilema untuk pimpinan marga Pegagan Ilir Suku II yang cepat menyadari bahaya pembaharuan Islam merupakan ancaman terbuka terhadap kedudukan mereka. Untuk mencegah terjadinya indetifikasi sepihak antara oposisi religius dengan politik di marganya, pasirah Sungai Pinang segera mempererat hubungannya dengan tokoh oposisi di Talang Balai. Koalisi ini akhirnya terwujud dalam bentuk perkawinan H.Hamdan dengan putri Pangeran H.Malian dari Sungai Pinang, yang secara tidak langsung menjamin dukungan politik terhadap program pembaharuan Islam di Talang Balai.

Konflik Antara *Kaum Tuo-Kaum Mudo* Dalam Krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja Ogan Ilir

Keberadaan beberapa organisasi yang muncul sejak awal abad ke-20 sampai awal 1939 di Sumatera Selatan, pada satu sisi menandai kebangkitan umat Islam di wilayah ini untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir. Namun, di sisi lain kemunculan organisasi-organisasi ini, terutama organisasi sosial keagamaan Islam, sedikit banyak juga menceritakan adanya polarisasi dan bahkan konflik di antara sesama umat Islam. Sebuah komentar bernada pesimis misalnya, menyatakan:

"Timboelnja beberapa organisatie diwaktoe itoe, tidak membikin perpetjahan dan perpisahan menjadi hilang malah sebaliknya seakan- akan setiap mentjoelnja soeatoe perkoepolan, hanja didorong oleh adanja dasar-dasar yang memisahkan dan memetjahkan (Perjta Selatan, No. 29, 9 1939, hlm. 2).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, konflik yang paling jelas dan memakan waktu cukup lama di Palembang adalah konflik paham keagamaan diantara kalangan Islam tradisional (*Kaum Tuo*) dan

kalangan Islam Pembaharuan (*Kaum Mudo*). Polarisasi dan konflik antara kedua kelompok ini di Karesidenan Palembang terjadi hampir di semua wilayah baik di kota Palembang maupun pedesaan *Iliran* dan *Uluan*.

Kajian tentang konflik keagamaan di Palembang yang dilakukan oleh Jeroen Peeters lebih menekankan pada segi lembaga-lembaga keagamaan dan tidak banyak mengkaitkan realitas konflik ini dalam bidang pendidikan Islam, memang ada beberapa penjelasan tentang konflik keagamaan yang terjadi dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, serta Peeters hanya mengangkat dua kasus saja yakni kasus konflik yang melibatkan pemimpin Madrasah Syamsul Huda di Kampung 4 Ulu Kota Palembang dan Kasus Madrasah Al-Irsyad Pagar Dewa, Ranau. Padahal terdapat beberapa kasus lain yang belum dikemukakan dalam disertasi tersebut.

Lainnya halnya dengan yang di ungkapkan Ismail, yakni dalam pembahasannya mengemukakan banyak kasus lain dan berupa konflik *Kaum Tuo-Kaum Mudo* memasuki wilayah pendidikan Islam tersebut ikut menentukan dinamika dan kekhasan perkembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di wilayah ini. Pembahasan berikut ini berbeda dengan dua kajian sebelumnya yaitu hanya memfokuskan pada Madrasah Islamiyah Tanjung Raja sebagai madrasah yang berdiri di pedesaan pertama kali. Lebih jauh berusaha mencari penjelasan tentang sejarah dan studi atas konflik *Kaum Tuo-Kaum Mudo* dalam krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja, Ogan Ilir Tahun 1925-1932.

Sebagaimana dipahami bahwa perkembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di manapun tidak berada dalam ruang hampa, tetapi sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi keagamaan, sosial, ekonomi, politik yang terjadi pada masa itu. Karena itu, kajian ini juga mencari penjelasan tentang sejauh mana faktor-faktor tersebut ikut memainkan peran dalam menghambat maupun memacu perkembangan dan resistensi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam.

Konflik antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* terjadi dalam krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja. Hal ini diawali oleh kecurigaan sebagian pemuka dan anggota masyarakat terhadap paham keagamaan beberapa tenaga pengajar madrasah ini. Sebagaimana telah dijelaskan, sejak awal berdirinya pada 1926, Madrasah Islamiah Tanjung Raja dipimpin seorang guru bernama Sajid bin Agil yang berasal dari organisasi dan perguruan Jami'at Khair di Betawi. Meskipun pada tahun-tahun pertama mendapat respon positif dari masyarakat, memasuki 1928 madrasah ini mulai menunjukkan kemunduran yang ditandai semakin sedikitnya siswa-siswa yang aktif dan berhenti bersekolah. Keadaan ini membuat Sajid bin Agil sampai kepada dugaan bahwa telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Karena kondisi yang tidak kondusif ini, maka ia kemudian meminta izin untuk berhenti. Pengunduran diri ini juga disebabkan keyakinannya bahwa ia tidak akan sanggup lagi mengembalikan sekolah ke kondisi semula (*Pertja Selatan*, No. 39, Kamis 3 April 1930, hlm.5-6.). Walaupun tidak terdapat penjelasan rinci mengenai hal ini, tampaknya krisis kepercayaan itu terutama disebabkan oleh ketidaksenangan sebagian masyarakat terhadap latar belakang paham keagamaan Sajid bin Agil yang dianggap cenderung kepada paham agama yang dianut oleh *Kaum Mudo*. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa Sajid bin Agil adalah utusan Jami'at Khair Betawi, sebuah organisasi pembaharuan Islam yang pertama-tama mengenalkan pembaharuan dalam pendidikan Islam di Pulau Jawa (Noer, 1996: 121). Di kalangan pengikut *Kaum Tuo* memang terdapat pandangan yang agak miring terhadap keberadaan Jami'at Khair. Hal ini tampak ketika sebuah komentar yang dikutip dari Ismail bahwa penyejajaran organisasi Muhammadiyah, Al-Irsjad, dan Jami'at Khair semacam Sajid Agil tampaknya agak sulit diterima di kalangan masyarakat Desa Tanjung Raja yang mayoritasnya menganut paham Islam Tradisional (*Kaum Tuo*). Dugaan ini kelak akan semakin tampak dalam kasus yang dihadapi oleh guru Sajid bin Agil bernama Moehammad Zen

yang *notabenenya* merupakan alumni Jami'at Khair (*Pertja Selatan*, No. 39, Kamis, 3 April 1930, hlm. 5-6).

Pernyataan tersebut jelas menyejajarkan ketiga organisasi itu sebagai komponen pembaharuan. Kasus yang dihadapi Mohammad Zen diawali dengan munculnya isu menjelang liburan siswa menyambut ibadah puasa Ramadhan pada tahun 1930. Isu ini menyatakan bahwa Mohammad Zen, selaku Kepala Madrasah Al-Islamiah adalah seseorang yang termasuk *Kaum Mudo*. Sebuah artikel menyatakan bahwa, "*Desas-desoes jang saja seboetkan itoe ialah menoeoeh bahasa kepala ini sekolah ialah seorang jang masoek kaoem moeda (Wahabi) (bagaimana takoetnja orang kampoeng mendengar kalimat ini, tentoe pematja makloem)*" (*Pertja Selatan*, No. 39, Kamis, 3 April 1930, hlm. 5-6). Dari sini jelas terlihat bahwa mayoritas, bahkan mungkin seluruh masyarakat Tanjung Raja sangat tidak nyaman dengan stigma *Kaum Mudo* yang dianggap keluar dari alur utama paham agama Islam tradisional. Ungkapan ini juga mengisyaratkan bahwa kepegangan yang sebagian disertai fanatisme membuat mereka menaruh kecurigaan berlebihan terhadap paham keagamaan serta simbol-simbol *Kaum Mudo*.

Akibat isu Wahabi ini sebanyak limapuluh orang siswa berhenti dari Madrasah Islamiyah. Isu ini bahkan terus menjadi buah bibir sebagian besar masyarakat, "...*sampai salah satoe pendoeoek memboeat rekest pada Bestuur dari sekolah menerangkan kemenjesalan hatinja atas perboetan bestuur, membiarkan seorang Wahabi sperti toan Hadji Mohammad Zen mengadjar di itoe sekolah.*" (*Pertja Selatan*, No. 39, Kamis, 3 April 1930, hlm. 5-6). Melihat keadaan ini, maka selama liburan puasa Mohammad di Jami'at Khair tentang beberapa persoalan keagamaan yang menjadi pemicu perbedaan paham antara dirinya dengan para Kiai atau Ulama di Tanjung Raja. Dikabarkan bahwa dua hari menjelang dibukanya kembali sekolah pascaliburan, Mohammad Zen belum juga kembali dari Betawi. Hal ini semakin menggelembungkan isu yang sudah ada dan memunculkan isu baru yang menyatakan bahwa Mohammad Zen tidak akan kembali lagi karena kalah argumentasi dalam

perebatannya dengan para Ulama Tanjung Raja. Bahkan muncul pula isu yang menyebutkan ia telah melarikan diri. Santernya isu tambahan ini mengakibatkan beberapa pengelola Madrasah Islamiyah sedikit bimbang dan bahkan kemudian berupaya mencari calon pengganti. Profil calon pengganti H.Mohammad Zen ini oleh sebagian masyarakat dianggap memenuhi kriteria kesalehan yang diidealkan, sebagaimana dikatakan,

"*Waktoe itoe pendoeoek bertepoek tangan karena riang hatinja. Makloem candidat goeroe baroe ini orang jang saleh, lagi satoe anak moda jang soka berpakaian setjara Arab, dan berlainan benar dengan toean Hadji Mohamad Zen jang hari-hari biasa pakai pantalon dengan dasinja*" (*Pertja Selatan*, No. 39, Kamis, 3 April 1930, hlm. 5-6).

Tampaknya segi penampilanpun menjadi bahan bagi sebagian masyarakat untuk menilai profil Mohammad Zen. Kebiasaannya yang memakai pantalon dan dasi tampaknya masih dianggap sebagai tradisi yang bertentangan dengan paham Islam *Kaum Mudo*. Berbagai isu tentang Mohammad Zen ternyata terbukti tidak benar karena seehari menjelang dibukanya sekolah pasca liburan puasa, ia datang dari Betawi kemudian mengajar sebagaimana biasanya. Bahkan agak mengherankan karena dalam pembukaan sekolah kali ini telah mendaftar tidak kurang dari seratus orang siswa baru baik putra maupun putri.

Dalam kesempatan berpidato pada pembukaan kembali madrasah tersebut, pengurus organisasi Islamiyah (patron Madrasah Islamiyah) maupun H.M. Zen sendiri melakukan klarifikasi terhadap semua isu yang berkembang dan berharap agar masyarakat datang sendiri ke Madrasah atau melayangkan surat jika menganggap pengelola maupun guru Madrasah melakukan kesalahan. "*Di roemah saja sedia setiap hari terboeka boeat menerima apa-apa keberatan tentang hal ini sekolah, kalau saja tidak dapat membereskannya saja tanggoeng boeat mengoempolkan orang jang dikira bisa membereskan hal itoe.*" (*Pertja Selatan*, No. 39, Kamis, 3 April 1930, hlm. 5-6). Mengomentari keadaan ini penulis artikel yang terus mencermati peristiwa ini menyatakan:

Dalam pikiran peneolis, kalau toean Hadji Mohammad Zen akan lekas dapat kepertjajaan dari publiek, dengan segera hendaknja toean beli satoe kajoe kain poetih oentoek dililitkan dikepala sebagai sorban dan mengambil beberapa bidji djamboe tjotjok dengan tali jang pandjang sebagai tasbich. O!ada-ada sadja kalau orang koerang onderwijs. (Pertja Selatan, No. 39, Kamis, 3 April 1930, hlm. 5-6).

Dari kutipan di atas senada dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa tri pusat pendidikan amat berperan terhadap keberlangsungan suatu lembaga pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh sebab itu tingkat pembaharuan dalam bidang pendidikan dapat saja secara cepat berkembang secara sporadis namun bagaimana eksistensi dari keberlangsungan suatu lembaga pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Upaya mengeliminir konflik keagamaan khususnya antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo*, dan upaya mempersatukan umat Islam dari berbagai latar belakang organisasi tidak berhasil dilakukan MPII, maka pada akhir Januari 1939 beberapa tokoh dan aktivis organisasi dan pendidikan Islam memprakarsai kembali upaya rekonsiliasi dan integrasi tersebut. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk membentuk sebuah organisasi yang disebut "*Ittihadoel Oelama*" (IO).

Sesuai dengan program kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pada Juni 1939 IO telah membuka cabang organisasi di beberapa wilayah kota Palembang dan Desa Sungai Pinang. Seperti yang dikutip pada *Pertja Selatan* berikut ini:

"Tjita-tjita jang telah dilahirkan IO ini agaknya telah menimboelkan kesan jang sangat baik kepada pendoekdoe Soengai Pinang, jang telah merasai betapa pahit-getirnja boeah dari pertikaian sebangsa dalam masalah dan soal jang ketjil-ketjil, akan tetapi bagi mereka jang tidak maoe insjaf telah didjadikan alat sehingga djadi pertikaian dan pertengkaran jang besar dan hebat. Semenendjak adanja Conferentie Moehammadijah di Soengai Pinang jang lampau, diantara pembijaranja ialah Ketoea IO Kijai H.A Bakar Bastarij, mengoepas

dan keboroekan berpetja-belah, di saat itoelah perasaan IO itoe moelai tertanam di dada masing-masing pendoe Soengai Pinang, hingga sekarang mewoejoekan bentoek dan bangoennja dengan terdirinja tjabang IO disana jang soedah mempoenjai lebih dari 100 anggota dengan Soeosan pengeroes K. Ahmad H.Pahja sebagai Ketoea." (Perjta Selatan, No. 67, 6 Juni 1939, hlm.1-2)

Berdasarkan teori kelanjutan dari konflik antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* di Tanjung Raja yang dikembangkan dalam gagasan teori konflik Lewis A.Coser yang dapat dianalogikan pada abstraksi fungsi positif konflik yaitu Dinamika Organisasi pergerakan Islam di Indonesia pada awal abad ke- 20 tidak bisa terlepas dari suatu pemahanan tentang masalah-masalah pokok di dalam Kongres-Kongres Al-Islam yang dimaksudkan sebagai wadah proses integrasi organisasi Islam di Indonesia. Diadakannya Kongres Al-Islam 1922-1941, kongres yang ke-25 diadakan di Palembang dengan salah satu hasilnya adalah di bentuknya *Ittihadoel Oelama*. Konflik yang terjadi antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* memberikan dampak positif yaitu kemunculan kantong-kantong Muhammadiyah di Pegagan Ilir, seperti yang dilansir dalam surat kabar berikut ini:

"Toean A.M. Sidik moelai bitjara dengan terang, manoesia moesti berkoempoel bersatoe dengan persatoean itoelah semoea maksoed moedah terdjadi asal persatoean jang soetji menoeroet perentah Allah dan Rasoelenja, Nasi sekalipoen tidak bisa masoek keperoet dengan moedahnja kalau tidak dengan persatoean oemoem (Pertja Selatan No.13, 30 Januari 1937).

Dari kutipan tersebut jelas bahwa konflik antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* berujung pada tahap penyelesaian yakni adanya persatuan dengan dibentuknya *Ittihadoel Oelama* cabang Ogan Ilir dan akhirnya berdasarkan hasil kesepakatan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Pegagan Ilir tetap berdiri sampai dengan sekarang.

SIMPULAN

Konflik sosial keagamaan yang terjadi di Tanjung Raja Ogan Ilir dalam hal ini lebih pada apa yang dinamakan *furu'iyah* antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* dalam praktik keagamaan serta dalam institusi pendidikan yang dalam hal ini Madrasah Islamiyah hanya dijadikan sebagai wadah penyebaran ideologi antara *Jami'atul Khair*, *Jami'atul Khair*, yang selanjutnya lebih berkembang organisasi Muhammadiyah. Adapun akhir dari perseteruan konflik tersebut diakhiri dengan adanya persatuan dengan dibentuknya *Ittihadoel Oelama* cabang Ogan Ilir. Meskipun telah dibentuknya *Ittihadoel Oelama* tetap saja terjadi gesekan-gesekan kecil dan diakhiri sekolah-sekolah Muhammadiyah di Pegagan Ilir tetap berdiri sampai dengan sekarang dikarenakan beberapa hal yaitu secara finansial organisasi Muhammadiyah mendapat dukungan dari para elit yang ada di Ogan Ilir serta *sense of belonging* terhadap organisasi Muhammadiyah itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Asnan, Gusti. *Sungai dan Sejarah Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2002. *Kerukunan Umat Islam dalam Beribadah*. Jakarta: ANRI.
- Boland, Bernard Johan. 1985. *Pergumulan Islam di Indoensia*, terj. Saafrodien Bahar. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Departemen P & K Sumatera Selatan. 1985. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, (Palembang: Proyek IDKD Dep. P & K.
- Edwin, M. Loeb. 2013. *Sumatera Sejarah dan Masyarakatnya*. Yogyakarta: Ombak
- Islamiet, "Sekolah Al- Islamiah Tanjung Radja", dalam *Pertja Selatan*, No. 39, Kamis, 3 April 1930.
- Ismail. 2014. *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Karesidenan Palembang 1925-1942*. Yogyakarta: Idea Press.
- I.O. Mengembangkan Sajapnja", dalam *Perjta Selatan*, No. 67, 6 Juni 1939
- Ittihadoel Oelama", dalam *Pertja Selatan*, No.29, 9 Maret 1939.
- Jeroen, Peteers. 1997. *Kaum Tuo- Kaum Mudo Perubahan Religijs Islam di Palembang 1821-1942*, terj. Sutan Maimoen Jakarta: INIS.
- Kasoeboerannja Palembang, dalam *Hanpo*, 29 November 1926.
- Mestika Zed. 2003. *Kepilangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nyimas Umi Kalsum, "Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam pada Abad Modern", *Jurnal Tamaddun*, Vol 14 Nomor 2/2014.
- Purwanto, Bambang. 1992. *From Dusun to the Market: Native Rubber Cultivation in Southern Sumatera, 1890-1949* London: *Disertasi*, Universty of London.
- Rapat Oemoem Moehammadijah di Kajoeagoeng", *Pertja Selatan* No.13, 30 Januari 1937.
- Rochmiatun, Endang. 2018. *Elite Lokal Palembang Abad XIX-XX: Kajian terhadap Kedudukan dan Peran Haji Mukim* (Jurnal Adabiyah, Vol 18 Nomor 1/2018).
- Steenbrink, Karel. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Yunus, Muhammad. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hadikarya Agung.